Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 4, Nomor 5, June 2026, P. 301-307
E-ISSN: 2986-6340
Licenced by CC BY-SA 4.0
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.20833032

Paradoks Twiplomacy Donald Trump: Implikasinya Terhadap Kerentanan Keamanan Digital Amerika Serikat

Riska
Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin
Email: officialriska2@gmail.com

ABSTRAK

Perkembangan media sosial telah menggeser praktik diplomasi konvensional ke ranah digital, melahirkan fenomena yang dikenal sebagai Twiplomacy. Selama masa kepresidenannya (2017–2021), Donald Trump menjadikan platform X (sebelumnya Twitter) sebagai instrumen diplomasi utama melalui akun @realDonaldTrump, yang kemudian memunculkan paradoks besar: di satu sisi twiplomacy memperluas jangkauan komunikasi kebijakan luar negeri secara real-time, namun di sisi lain kebiasaan oversharing dan komunikasi impulsif Trump di media sosial secara sistematis menciptakan celah kerentanan bagi keamanan digital Amerika Serikat. Artikel ini menganalisis paradoks tersebut dengan mengidentifikasi tiga dimensi risiko utama yang ditimbulkan oleh aktivitas Twiplomacy Trump, yakni: (1) kebocoran informasi intelijen rahasia negara, (2) destabilisasi pasar keuangan global, dan (3) eskalasi konflik diplomatik dan militer. Penelitian ini menerapkan metode kualitatif deskriptif-analitis dengan pendekatan studi kepustakaan, berpijak pada kerangka teori sekuritisasi dan keamanan digital. Temuan menunjukkan bahwa komunikasi digital seorang kepala negara bila tidak diimbangi dengan protokol keamanan siber yang ketat dapat bertransformasi dari instrumen soft power menjadi vektor ancaman nyata terhadap stabilitas keamanan nasional.
Kata Kunci: *Twiplomacy; Keamanan Digital; Donald Trump; Media Sosial; Sekuritisasi*

ABSTRACT

The rise of social media has fundamentally shifted conventional diplomatic practices into the digital realm, giving birth to the phenomenon known as Twiplomacy. During his presidency (2017–2021), Donald Trump transformed platform X (formerly Twitter) into his primary diplomatic instrument through the @realDonaldTrump account, creating a major paradox: while Twiplomacy expanded the reach of real-time foreign policy communication, Trump's habitual oversharing and impulsive social media behavior systematically generated vulnerabilities in the United States' digital security posture. This article analyzes that paradox by identifying three primary risk dimensions arising from Trump's Twiplomacy activities: (1) leakage of classified state intelligence, (2) destabilization of global financial markets, and (3) escalation of diplomatic and military conflicts. The study employs a qualitative descriptive-analytical method grounded in a literature review approach, underpinned by securitization theory and digital security frameworks. The findings demonstrate that a head of state's digital communications when not balanced with rigorous cybersecurity protocols can transform from a soft power instrument into a genuine threat vector against national security stability.
Keywords: *Twiplomacy; Digital Security; Donald Trump; Social Media; Securitization*

Article Info
Received date: 15 June 2026 Revised date: 17 June 2026 Accepted date: 22 June 2026

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini telah mengubah bagaimana sistem dunia internasional bekerja. Menurut Buzan et al. (1998, sebagaimana dikutip dalam Budiman, 2022) jangkauan studi keamanan kontemporer sudah tidak lagi terbatas pada ancaman militer dan pertahanan negara, tetapi saat ini studi keamanan telah mengalami transisi dan melebar ke dunia digital. Dalam konteks ini, keamanan digital dan keamanan informasi muncul sebagai pilar krusial dalam kajian keamanan non-tradisional. Seiring dengan arus digitalisasi yang semakin melebar, negara dituntut untuk fokus terhadap masalah digitalisasi, memastikan bahwa keamanan digital suatu negara baik-baik saja. Di dalam jurusan Ilmu Hubungan Internasional terdapat istilah yang dikenal dengan "Sekuritisasi".

Sekuritisasi pada dasarnya merupakan proses pergeseran status suatu isu politik biasa atau yang dianggap bukan ancaman menjadi urusan keamanan. Isu yang awalnya bersifat non-militer ini dibingkai sedemikian rupa sebagai sebuah ancaman mendesak, sehingga pada akhirnya 'naik kelas' menjadi prioritas utama dalam agenda nasional maupun internasional (Budiman, 2022).

Seiring berkembangnya zaman dan transisi sistem global, pemimpin negara dan aktor diplomatik kini secara aktif memanfaatkan media sosial sebagai instrumen komunikasi politik langsung kepada publik global, sebuah fenomena yang dikenal dengan istilah *Digital Diplomacy* atau secara spesifik di platform X (sebelumnya Twitter) disebut sebagai *Twiplomacy*. Praktik ini idealnya dirancang untuk memperluas *soft power*, membangun citra positif, serta menyebarkan kebijakan luar negeri secara *real-time* tanpa hambatan birokrasi tradisional.

Pergeseran ini semakin nyata ketika para pemimpin dunia dan diplomat mulai aktif memanfaatkan media sosial sebagai jalur alternatif untuk menjalankan diplomasi, sebuah tren yang sering disebut sebagai diplomasi digital. Tujuan awal memang untuk membuka ruang dialog secara langsung dengan publik internasional dan melewati perantara birokrasi pemerintahan yang kaku (Aslam, 2025). Namun, ketika seorang kepala negara atau seorang yang memiliki pengaruh global menggunakan akun platform digital untuk urusan diplomatik, saluran tersebut otomatis menjadi sasaran empuk bagi masalah keamanan siber (Aslam, 2025). Oleh karena itu, aktivitas digital para elit politik ini memicu kewajiban baru: saluran komunikasi pribadi mereka harus disekuritisasi, atau perlu dibatasi terkait hal yang bisa dibagikan kepada publik dan yang seharusnya tidak dibagikan, karena memuat informasi yang bersinggungan langsung dengan ancaman peretasan dan kebocoran rahasia negara (Aslam, 2025).

Kejadian ini muncul secara paling menonjol pada masa pemerintahan Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat periode 2017–2021. Di mana dalam banyak postingannya, gaya komunikasi Trump di Twitter (kini X) dianggap terlalu berlebihan dan impulsif. Trump terbiasa mencuitkan hal-hal tanpa pertimbangan yang matang atau memikirkan konsekuensi ke depannya (Taşente, 2020). Kebiasaan membagikan informasi hasil perundingan multilateral yang terlalu transparan ini jelas bukan sekadar taktik politik yang unik atau bahan lelucon, tetapi ini merupakan sebuah celah keamanan yang sangat berbahaya. Selain rentan terhadap peretasan akun pribadi (Aslam, 2025), cuitan yang tidak tersaring juga kerap kali muncul dalam bentuk ancaman langsung kepada negara lain, sebagai contoh Donald Trump pernah melakukan ancaman dan berkata akan menghancurkan ekonomi Turki secara total (Değirmenci & Terzioğlu, 2022). Tindakan semacam ini secara langsung memberikan efek negatif dan memunculkan ketegangan diplomatik, merusak protokol pemerintahan, dan menciptakan kerentanan informasi yang membuat kebijakan luar negeri menjadi sulit ditebak (Aslam, 2025).

Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara mendetail bagaimana aktivitas *Twiplomacy* Donald Trump beroperasi yang tidak hanya memengaruhi sistem diplomasi, tetapi juga bisa berubah menjadi titik kerentanan bagi keamanan digital Amerika Serikat. Identifikasi masalah difokuskan pada analisis risiko dari berbagai informasi yang terlalu transparan dan dampaknya terhadap stabilitas keamanan Amerika Serikat.

METODE

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif-analitis. Pemilihan desain kualitatif ini dirasa paling tepat karena fenomena *Twiplomacy* Donald Trump merupakan dinamika komunikasi politik yang sarat akan makna, interpretasi, dan implikasi kontekstual yang tidak bisa diukur secara akurat jika hanya mengandalkan angka atau statistik. Melalui pendekatan deskriptif-analitis, peneliti tidak sekadar menghitung jumlah atau mengklasifikasikan cuitan yang dilontarkan oleh Trump di platform X (Twitter). Lebih dari itu, pendekatan ini digunakan untuk mengurai, melacak, dan membedah bagaimana narasi digital yang dilempar ke ruang publik siber secara

bertahap bertransformasi menjadi ancaman nyata yang menggeser batas-batas keamanan nasional konvensional.

Mengingat fokus kajian ini berada pada ruang siber dan rekam jejak digital masa lalu, teknik pengumpulan data sepenuhnya mengandalkan studi kepustakaan (*literature review*). Sumber data yang digunakan murni berupa data sekunder yang dihimpun secara selektif dari berbagai literatur akademik terpercaya. Data tersebut meliputi artikel jurnal nasional maupun internasional bereputasi, buku teks utama Hubungan Internasional, serta dokumen kajian strategis mengenai keamanan siber dan intelijen. Selain itu, untuk menangkap realita empiris di lapangan, peneliti juga mengumpulkan data dari dokumen laporan resmi pemerintah, arsip digital khusus (seperti *The Trump Archive*), serta rekam jejak pemberitaan media massa global yang mendokumentasikan dampak langsung dari aktivitas digital Trump selama masa jabatannya.

Seluruh data yang telah terkumpul tidak langsung dipakai, melainkan disaring dan dikelompokkan secara tematik terlebih dahulu agar relevan dengan fokus masalah. Proses analisis data selanjutnya dilakukan dengan menggunakan pisau analisis berupa kerangka keamanan digital dan teori sekuritisasi. Tahapan analisis ini dimulai dengan mengidentifikasi pola-pola komunikasi impulsif atau kebiasaan *oversharing* Trump di media sosial, lalu memetakan dampak dari setiap cuitan tersebut ke dalam indikator kerentanan siber. Indikator ini mencakup potensi kebocoran informasi rahasia negara, pemicu kepanikan pasar saham, hingga eskalasi konflik militer di dunia nyata.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Twiplomacy sebagai Instrumen dan Celah Keamanan

Twiplomacy merujuk pada praktik kepala negara dan diplomat dalam menggunakan platform Twitter (kini X) sebagai kanal resmi diplomasi digital. Studi *Twiplomacy* tahunan yang diterbitkan oleh Burson Cohn & Wolfe (BCW) konsisten mencatat bahwa hampir seluruh pemimpin dunia telah memiliki akun aktif di platform tersebut. Dalam konteks ini, Trump bukan pemimpin pertama yang memanfaatkan Twitter untuk komunikasi kebijakan luar negeri. Akan tetapi, ia menjadi yang paling kontroversial karena menggunakannya dengan gaya yang secara fundamental berbeda dari norma diplomatik yang berlaku (Aslam, 2025; Taşente, 2020).

Selama periode 2017–2021, akun @realDonaldTrump mengunggah lebih dari 25.000 tweet, yang mencakup spektrum sangat luas mulai dari kebijakan luar negeri, ancaman terhadap negara lain, komentar tentang intelijen sensitif, hingga serangan personal terhadap pemimpin asing. Menurut Aslam (2025), paradoks utama Twiplomacy Trump terletak pada fakta bahwa kanal yang seharusnya berfungsi sebagai *megaphone* diplomasi publik malah berubah menjadi sumber kerentanan sistemik. Dengan kata lain, keterbukaan yang menjadi kekuatan diplomasi digital justru menjadi titik lemah dari perspektif keamanan informasi nasional.

Kerangka teori sekuritisasi yang dikembangkan oleh Mazhab Kopenhagen melalui konsep Barry Buzan, Ole Wæver, dan Jaap de Wilde memberikan alat analisis yang tepat untuk memahami fenomena ini. Sekuritisasi adalah proses di mana suatu aktor (biasanya negara) mengkonstruksi suatu isu sebagai ancaman eksistensial yang memerlukan respons darurat di luar prosedur politik normal (Buzan et al., 1998). Dalam kasus Trump, justru terjadi proses yang terbalik: alih-alih meng-sekuritisasi ancaman luar, praktik komunikasinya sendiri malah menciptakan celah yang perlu di-sekuritisasi. Aktivitas media sosial seorang presiden berubah menjadi isu keamanan nasional yang mendesak.

Kebocoran Intelijen: Kasus Foto Satelit Rahasia Iran (2019)

Salah satu insiden paling dramatis dari Twiplomacy Trump adalah peristiwa 30 Agustus 2019, ketika Trump secara langsung mengunggah ke Twitter sebuah foto resolusi tinggi yang menunjukkan kerusakan di fasilitas peluncuran roket Iran di Semnan foto yang bersumber dari dokumen intelijen rahasia tingkat tertinggi (*top secret codeword*) yang ia terima dalam briefing intelijen hariannya.

Menurut laporan NPR (2022) yang diperoleh melalui Freedom of Information Act (FOIA), foto tersebut ternyata berasal dari satelit mata-mata bernama USA-224, yang diyakini merupakan satelit KH-11 seharga miliaran dolar milik National Reconnaissance Office (NRO) Amerika Serikat. Foto itu sangat tajam sehingga para ahli intelijen awalnya tidak percaya bahwa gambar tersebut diambil dari orbit. Cara Trump mendapatkan foto tersebut pun mengungkap lemahnya protokol keamanan: karena perangkat digital yang ia gunakan untuk menerima briefing terputus dari internet publik, Trump meminta seorang ajudan memotret hardcopy foto dari briefing fisiknya dengan kamera ponsel, lalu mengunggahnya ke Twitter (Yahoo News, 2021).

Dampak dari tindakan impulsif ini sangat serius. Para ahli di komunitas intelijen Amerika Serikat menyatakan kepanikan. Mantan Direktur National Geospatial-Intelligence Agency (NGA), Robert Cardillo, menegaskan bahwa negara-negara musuh khususnya Rusia dan Iran pasti akan menganalisis gambar tersebut secara mendalam untuk memahami resolusi dan kapabilitas teknis satelit pengintai Amerika. Ketika musuh mengetahui apa yang bisa "dilihat" satelit AS, mereka memiliki kesempatan untuk mengambil tindakan kontra-intelijen: melakukan kamuflase, mengubah pola aktivitas, atau memindahkan aset strategis (NPR, 2022). Seorang ahli pelacak satelit, Marco Langbroek dari Belanda, bahkan berhasil mengidentifikasi satelit sumber foto tersebut hanya dalam beberapa jam setelah tweet diunggah membuktikan bahwa adversary level negara pun bisa dengan mudah melakukan hal yang sama.

Steven Aftergood dari Federation of American Scientists menyebut kejadian ini sebagai bukti "kecerobohan yang luar biasa" dari Trump dan "ketidakhormatan terhadap intelijen luar biasa yang ia terima" (NPR, 2022). Lebih jauh, insiden ini tidak berdiri sendiri: sebelumnya, pada 2017, Trump juga pernah membocorkan informasi tentang program CIA di Suriah melalui Twitter, dan dalam sebuah pertemuan di Oval Office ia secara langsung menyerahkan informasi intelijen sangat rahasia kepada pejabat Rusia termasuk detail operasi Israel yang bahkan belum dibagikan kepada sekutu NATO Amerika Serikat (Wikipedia, 2023).

Destabilisasi Pasar Keuangan: Tweet sebagai Senjata Ekonomi

Dimensi kerentanan kedua dari Twiplomacy Trump adalah dampaknya terhadap stabilitas pasar keuangan global. Trump adalah presiden pertama dalam sejarah modern yang secara konsisten dan tanpa pola yang dapat diprediksi menggunakan Twitter untuk menyerang perusahaan-perusahaan publik secara spesifik, menciptakan apa yang oleh kalangan Wall Street disebut sebagai "*Tweet Risk*" atau risiko cuitan (FXCM, 2021).

Kasus paling emblematik adalah ketika Trump mencuit pada 12 Desember 2016 bahwa program F-35 Lockheed Martin "out of control" dan miliaran dolar bisa dihemat. Dampaknya langsung terasa: saham Lockheed Martin anjlok 4% dalam hitungan menit setelah tweet muncul, memusnahkan nilai pasar sekitar 4 miliar dolar AS dalam satu sesi perdagangan (FXCM, 2021). Kejadian serupa berulang pada saham Boeing, General Motors, Toyota, Amazon, Harley-Davidson, dan sejumlah perusahaan lain yang menjadi sasaran tweet Trump. Menurut studi Wall Street Journal yang dikenal sebagai "Trump Target Index", setidaknya 12 saham mengalami guncangan signifikan akibat tweet Trump selama 2016 hingga awal 2017 (Fortune, 2017).

Dari perspektif keamanan nasional, volatilitas pasar yang diciptakan oleh tweet-tweet presiden membuka celah bagi *market manipulation* oleh aktor asing yang memiliki akses terhadap feed Twitter Trump lebih cepat atau informasi insider tentang rencana tweet berikutnya. Penelitian Merrill Lynch bahkan menemukan bahwa hari-hari di mana Trump men-tweet lebih dari 35 kali cenderung berkorelasi dengan imbal hasil pasar saham AS yang negatif secara statistis signifikan (Yale Insights, 2024). Ini adalah bukti konkret bahwa kanal komunikasi pribadi seorang presiden dapat menjadi vektor destabilisasi ekonomi tidak hanya bagi Amerika Serikat, tetapi juga bagi mitra dan adversary globalnya.

Eskalasi Diplomatik dan Militer: Dari Cuitan ke Krisis

Dimensi ketiga dan paling berbahaya dari paradoks Twiplomacy Trump adalah potensi eskalasi konflik diplomatik dan militer yang ditimbulkan oleh komunikasi impulsifnya. Diplomasi tradisional ditopang oleh prinsip-prinsip nuansa, protokol, dan pemilihan kata yang cermat. Trump, menurut Aslam (2025), adalah antitesis sempurna dari atribut-atribut tersebut.

Kasus paling mengkhawatirkan adalah perang retorika dengan Korea Utara. Pada 8 Agustus 2017, Trump secara terbuka memperingatkan bahwa Korea Utara akan dihadapi dengan "*fire and fury*" jika terus mengancam Amerika Serikat sebuah pernyataan yang tidak melalui koordinasi dengan Departemen Luar Negeri, Departemen Pertahanan, atau Dewan Keamanan Nasional (CNN, 2017). Senator John McCain, Ketua Komite Angkatan Bersenjata Senat, secara terbuka mengkritik pernyataan tersebut, mengingatkan bahwa "pemimpin besar tidak mengancam kecuali siap bertindak" (CNBC, 2017). Yang lebih mengkhawatirkan, menurut buku karya Michael Schmidt yang mengutip mantan Kepala Staf Gedung Putih John Kelly, Trump bahkan sempat mendiskusikan penggunaan senjata nuklir terhadap Korea Utara dan menyarankan untuk menyalahkan pihak lain atas serangan tersebut (NBC News, 2023).

Kebiasaan Trump mengancam negara lain melalui Twitter juga menjadi perhatian serius dalam studi keamanan siber. Cybersecurity expert Evan Blair dari ZeroFOX memperingatkan pada Februari 2017 bahwa akun Twitter Trump menjadi target peretasan bernilai tinggi karena "belum pernah sebelumnya kata-kata langsung dari seorang presiden dapat dikompromikan" (NBC News, 2017). Pada Oktober 2020, seorang peneliti keamanan etis dari Belanda bernama Victor Gevers melaporkan berhasil mengakses akun @realDonaldTrump setelah mencoba lima kemungkinan kata sandi dengan kata sandi "maga2020!" berhasil pada percobaan kelima karena akun tersebut tidak mengaktifkan fitur autentikasi dua faktor (Threatpost, 2020). Jika peretas berbahaya atau agen intelijen asing berhasil menguasai akun tersebut, sebuah cuitan palsu yang mengumumkan serangan militer atau perubahan kebijakan nuklir bisa memantik krisis internasional sebelum pihak mana pun sempat memverifikasinya.

Di luar ancaman peretasan, tweet-tweet Trump yang tidak tersaring juga merusak protokol diplomatik yang telah dibangun selama puluhan tahun. Menurut Taşente (2020), gaya komunikasi Trump yang lugas dan tanpa filter di Twitter mengganggu norma-norma diplomatik yang berlaku karena ia secara rutin membahas isu-isu sensitif seperti posisi negosiasi, evaluasi kekuatan militer, atau informasi dari briefing tertutup secara publik. Hal ini memberikan keuntungan informasi kepada adversary dan melemahkan posisi tawar Amerika Serikat dalam berbagai negosiasi internasional.

Implikasi terhadap Arsitektur Keamanan Digital Amerika Serikat

Secara keseluruhan, ketiga dimensi risiko di atas kebocoran intelijen, destabilisasi ekonomi, dan eskalasi konflik membentuk apa yang dapat disebut sebagai "*Twiplomacy Security Paradox*" kondisi di mana instrumen yang dirancang untuk memperkuat postur diplomatik Amerika Serikat justru secara tidak disengaja melemahkan keamanan digitalnya. Kasus Trump menunjukkan bahwa di era media sosial, kerentanan keamanan digital tidak lagi hanya datang dari serangan siber eksternal seperti peretasan atau *phishing*, tetapi juga dapat bersumber dari perilaku digital aktor internalnya sendiri dalam hal ini, kepala negara.

Sekuritisasi dalam konteks ini mengambil dimensi yang baru: bukan hanya aktivitas musuh yang perlu di-sekuritisasi, tetapi juga saluran komunikasi digital milik pejabat tinggi negara itu sendiri. Implikasinya bagi arsitektur keamanan digital Amerika Serikat sangat signifikan. Pertama, dibutuhkan regulasi dan protokol ketat mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dibagikan oleh pejabat pemerintah di media sosial terutama menyangkut informasi intelijen dan kebijakan militer. Kedua, diperlukan standardisasi pengamanan akun media sosial bagi seluruh pejabat tinggi, termasuk penggunaan autentikasi multi-faktor yang wajib. Ketiga, dibutuhkan mekanisme review dan klarifikasi cepat ketika pernyataan digital seorang pejabat menimbulkan dampak pasar atau diplomatik yang tidak diinginkan (Aslam, 2025).

SIMPULAN

Artikel ini telah membuktikan bahwa aktivitas Twiplomacy Donald Trump selama periode kepresidenannya 2017–2021 mengandung paradoks mendasar: sementara Twitter berfungsi sebagai instrumen komunikasi kebijakan luar negeri yang efektif dan real-time, pola komunikasi impulsif dan kebiasaan oversharing Trump secara sistematis menciptakan tiga dimensi kerentanan keamanan digital bagi Amerika Serikat.

Pertama, insiden foto satelit rahasia KH-11 pada 2019 menjadi bukti nyata bahwa kecerobohan digital seorang kepala negara dapat secara langsung mengekspos kapabilitas intelijen strategis Amerika Serikat kepada adversary. Kedua, tweet-tweet Trump yang menyasar perusahaan dan negara secara spesifik terbukti mampu mengguncang pasar keuangan global dalam hitungan menit, menciptakan peluang bagi manipulasi pasar dan destabilisasi ekonomi. Ketiga, retorika impulsif Trump di Twitter dari ancaman "fire and fury" hingga pengumuman kebijakan tarif mendadak merusak norma-norma diplomasi tradisional dan meningkatkan risiko miskomunikasi yang dapat berujung pada eskalasi konflik.

Melalui lensa teori sekuritisasi, kasus Trump mengajarkan pelajaran penting: di era diplomasi digital, kanal komunikasi media sosial seorang kepala negara perlu diperlakukan sebagai aset strategis sekaligus potensi vektor ancaman keamanan nasional. Twiplomacy, bila tidak disertai dengan protokol keamanan informasi yang ketat, dapat bertransformasi dari instrumen *soft power* menjadi *vulnerability point* yang dieksploitasi oleh aktor-aktor yang bermusuhan.

SARAN

Berdasarkan temuan-temuan dalam kajian ini, terdapat beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat dipertimbangkan oleh pemerintah Amerika Serikat dan negara-negara demokratis lainnya.

Pertama, perlu dirumuskan regulasi keamanan informasi digital yang secara eksplisit mengatur standar komunikasi media sosial bagi pejabat tinggi pemerintah, termasuk ketentuan mengenai informasi yang tidak boleh diungkapkan secara publik tanpa melalui proses review keamanan. Kedua, instansi keamanan siber seperti CISA (Cybersecurity and Infrastructure Security Agency) perlu diberi mandat untuk memastikan bahwa seluruh akun media sosial resmi pejabat pemerintah dilindungi dengan standar keamanan tertinggi, termasuk autentikasi multi-faktor yang bersifat wajib. Ketiga, perlu dikembangkan mekanisme respons cepat yang terkoordinasi antara komunitas intelijen, Departemen Keuangan, dan Departemen Luar Negeri untuk memitigasi dampak ekonomi dan diplomatik dari pernyataan tidak terencana di platform digital. Keempat, bagi komunitas akademis, kajian ini membuka peluang penelitian lebih lanjut untuk mengembangkan kerangka "Digital Security Diplomacy" yang dapat menjadi standar analisis bagi negara-negara yang menghadapi tantangan serupa di era post-Trump.

REFERENSI

Aslam, W. (2025). Digital diplomacy and cybersecurity risks: The securitization of social media in foreign policy. Journal of Cyber Policy, 10(1), 45–68.

Budiman, A. (2022). Sekuritisasi dan keamanan non-tradisional: Perspektif Mazhab Kopenhagen. Jurnal Ilmu Hubungan Internasional Indonesia, 8(2), 112–131.

Buzan, B., Wæver, O., & de Wilde, J. (1998). Security: A new framework for analysis. Lynne Rienner Publishers.

CNBC. (2017, December 23). Here's what happens to shares of companies that Trump attacks. Retrieved from https://www.cnbc.com/2018/04/05/heres-what-happens-to-shares-of-companies-that-trump-attacks.html

CNN. (2017, August 8). Trump promises North Korea ‘fire and fury ’over nuke threat. Retrieved from https://edition.cnn.com/2017/08/08/politics/north-korea-missile-ready-nuclear-weapons/index.html

Değirmenci, B., & Terzioğlu, F. (2022). Trump’s Twitter statecraft and the Turkey-US crisis: Economic warfare through social media. Turkish Studies, 23(4), 612–638.

Fortune. (2017, February 24). Donald Trump on Twitter: What a tweet does to a company’s share price. Retrieved from https://fortune.com/2017/02/24/trump-tweet-stocks/

FXCM. (2021). How does President Trump’s Twitter use impact Forex, markets and stocks? Retrieved from https://www.fxcm.com/markets/insights/president-trumps-twitter-impact-forex-markets-stocks/

Lüfkens, M. (2018). Twiplomacy study 2018 executive summary. Twiplomacy. Retrieved from https://twiplomacy.com/blog/twiplomacy-study-2018/

NBC News. (2017, February 22). What could happen if President Trump’s Twitter gets hacked? Retrieved from https://www.nbcnews.com/storyline/hacking-in-america/what-could-happen-if-president-trump-s-twitter-gets-hacked-n722736

NBC News. (2023, January 12). Trump discussed using a nuclear weapon on North Korea in 2017 and blaming it on someone else, book says. Retrieved from https://www.nbcnews.com/politics/donald-trump/trump-discussed-using-nuclear-weapon-north-korea-2017-blaming-someone-rcna65120

NPR. (2022, November 18). Declassified document shows Trump tweeted an image from a spy satellite. Retrieved from https://www.npr.org/2022/11/18/1137474748/trump-tweeted-an-image-from-a-spy-satellite-declassified-document-shows

PBS NewsHour. (2018, August 11). Trump’s tariff tweet inflames Turkey’s economic crisis and strained U.S. relations. Retrieved from https://www.pbs.org/newshour/show/trumps-tariff-tweet-inflames-turkeys-economic-crisis-and-strained-u-s-relations

Peng, Z., & Teo, T. (2019). Twiplomacy in the age of Donald Trump: Is the diplomatic code changing? The Information Society, 35(1), 43–56. https://doi.org/10.1080/01972243.2018.1542646

Schmidt, M. (2023, January 12). Trump discussed using a nuclear weapon on North Korea and blaming it on someone else. NBC News.

Taşente, T. (2020). Trump’s Twitter diplomacy and its effects on international relations. Journal of Political Science and International Relations, 3(1), 1–15.

Threatpost. (2020, October 22). Researcher: I hacked Trump’s Twitter by guessing password. Retrieved from https://threatpost.com/researcher-hacked-trumps-twitter-password/160473/

Wikipedia. (2023). Donald Trump’s disclosures of classified information. Retrieved from https://en.wikipedia.org/wiki/Donald_Trump%27s_disclosures_of_classified_information

Yahoo News. (2021, December 17). More than two years after Trump tweeted a classified image of Iran, former officials are divided on fallout. Retrieved from https://www.yahoo.com/news/trump-tweeted-classified-satellite-image-of-iran-former-officials-fallout-100003879.html

Yale Insights. (2024, August 2). Trump is already rattling the stock market. Retrieved from https://insights.som.yale.edu/insights/trump-is-already-rattling-the-stock-market